

# SEJARAH MIGRASI DAN SISTEM PENGHIDUPAN MIGRAN ETNIS BUGIS DI PERANTAUAN (STUDI KASUS MIGRASI ETNIS BUGIS DI KELURAHAN KAMPUNG LAUT DAN TANJUNG SOLOK, KECAMATAN KUALA JAMBI, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI)

Lesti Heriyanti<sup>1</sup>, Ekawati Sri Wahyuni<sup>2</sup>, Saharuddin<sup>3</sup>, Aida Vitayala S Hubeis<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa S3 Program Studi Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Pascasarjana IPB

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB

<sup>3</sup>Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB

<sup>4</sup>Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB

e-mail: [lestiheriyanti@umb.ac.id](mailto:lestiheriyanti@umb.ac.id)

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the history of migration and the livelihood system of ethnic Bugis in Jambi Province. The research used qualitative approach with descriptive analysis method. Data collected used interview with interview guide, observation non-participant and questionnaire 25 informan from ethnic Bugis, Javanese, Sundanese, Minangkabau and Bataknese. The results showed that: the history of Bugis ethnic migration to the Jambi region was a long history since the period after Indonesia became independent. The political and security turmoil after Indonesian independence encouraged Buginese to migrate to areas they considered safe and there were networks of Bugis communities in the region. The livelihood systems developed by Buginese are related to intra-social fabric links and between Buginese communities that are overseas. Social capital in the lives of ethnic Bugis overseas makes it easier for them to develop a livelihood system, supports the process of adaptation to new environments overseas and is even able to encourage a number of individuals to own assets and control the overseas economy.*

Keywords: migration, Bugis

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis sejarah migrasi dan sistem etnis Bugis di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang didukung oleh panduan wawancara semi terstruktur, dilengkapi dengan observasi partisipan. Kuesioner juga digunakan untuk proses melengkapi data. Penelitian dilakukan terhadap 25 orang informan yang berasal dari etnis Bugis, Jawa, Sunda, Minangkabau, dan Melayu. Hasil penelitian menyatakan bahwa migrasi etnis Bugis ke wilayah Jambi merupakan sejarah panjang sejak Indonesia merdeka. Gejolak politik dan keamanan pasca-Kemerdekaan Indonesia mendorong etnis Bugis untuk melakukan migrasi ke wilayah yang dinilai aman dan memiliki jaringan komunitas yang sama di wilayah tersebut. Keinginan untuk meraih tingkat ekonomi yang lebih baik juga mendorong migrasi ke luar wilayah tempat tinggal. Etnis Bugis di perantauan mengembangkan sistem pencaharian yang terkait dengan jalinan modal sosial intrakomunitas dan antarkomunitas yang ada. Kuatnya jejaring sosial dapat mendukung proses adaptasi dengan lingkungan baru di perantauan. Selain itu, juga mampu mendorong sejumlah individu untuk memiliki aset dalam jumlah yang besar dan menguasai perekonomian di perantauan.

Kata Kunci: migrasi, Bugis

## Pendahuluan

Migrasi merupakan suatu bentuk gambaran perpindahan penduduk yang dilakukan secara geografis dan bisa terjadi antarwilayah pedesaan, perkotaan, provinsi, pulau, dan bahkan antarnegara (Rusli, 2014). Migrasi terjadi karena berbagai hal, antara lain untuk mencari

pencaharian yang lebih baik (Tamtiari, 1999; Sofyan, 2013; Tridakusumah dkk., 2015; Sasongko & Wahyuni, 2013), sebagai jalan untuk mencari keamanan dan merupakan upaya menyelamatkan diri dari konflik sosial (Rahman, 2015), dan sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim (Hein & Faust, 2010; Black dkk., 2013)

Indonesia merupakan negara yang memiliki tradisi migrasi sejak lampau. Migrasi tersebut dilakukan dengan paksaan ataupun sukarela. Migrasi secara paksaan terjadi pada masa penjajahan Belanda. Penduduk Indonesia dipaksa bermigrasi ke wilayah bagian jajahan Belanda untuk dijadikan tenaga kerja paksa dalam bidang perkebunan dan pembangunan jalan raya bendungan. Migrasi jenis ini merupakan cikal bakal program transmigrasi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Pelaksanaan transmigrasi pada awalnya terjadi sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Transmigrasi ini dilakukan demi kepentingan ekonomi kolonial Belanda dan dikenal dengan istilah *kolonisatie*. *Kolonisatie* merupakan suatu bentuk penempatan orang-orang di daerah baru secara berkelompok (berkoloni) dan menyendiri dengan adat budaya sendiri yang berbeda dari penduduk asli. Pelaksanaan transmigrasi setelah Indonesia merdeka diwujudkan dalam bentuk pemindahan penduduk dari pulau yang padat, yaitu Jawa, ke daerah di luar pulau Jawa dan Bali. Transmigrasi pada masa kejayaannya menjadi suatu pola perpindahan penduduk yang dilaksanakan secara spontan dan swadaya. Masa depan yang dijanjikan oleh program transmigrasi bahkan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam proses transmigrasi dengan sukarela (Sayuti, 1984).

Migrasi secara sukarela dilakukan dengan alasan sebagai berikut: alasan ekonomi, ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan mencari perubahan kondisi status sosial yang lebih baik. Selain itu, terdapat pola migrasi dengan sukarela yang dilakukan oleh laki-laki dari etnis Bugis, Batak, dan Minang. Migrasi jenis ini dilakukan oleh masyarakat berupa perpindahan ke suatu wilayah baru dengan biaya sendiri dan tanpa keterlibatan pihak pemerintah dalam prosesnya. Proses migrasi dalam bentuk ini dikenal juga dengan istilah “merantau”. Kata merantau sendiri berasal dari bahasa Minang “rantau” atau “marantau” yang berarti wilayah lain yang berada di luar wilayah inti Minangkabau (Naim, 1979). Merantau yang dilakukan oleh pemuda etnis Minangkabau dilatarbelakangi oleh faktor

ekologi (geografis), ekonomi, dan pendidikan (Naim, 1979). Kegiatan merantau atau migrasi swadaya ini umumnya dilakukan oleh penduduk yang berasal dari etnis Minangkabau, Batak, dan Bugis. Beberapa daerah yang menjadi tujuan migrasi merupakan daerah baru, daerah pemekaran, atau bahkan kota besar yang dipilih sebagai tujuan bermigrasi dengan pertimbangan tertentu dari para migran.

Penelitian mengenai migrasi etnis Bugis pernah dilakukan oleh Saleh (2015) yang membahas dinamika masyarakat perbatasan, yaitu terkait dengan eksistensi etnis Bugis di perbatasan Indonesia Malaysia; Mansyur (2016) mengenai migrasi dan penguasaan ekonomi etnis Bugis di Kalimantan; Mulyoutami dkk. (2017) mengenai perjanjian penguasaan lahan oleh sesama etnis Bugis di Sulawesi Tenggara, Sani (2020) terkait diaspora Bugis dan penguasaan perdagangan kopra di Sumatra.

Penelitian ini membahas mengenai alur dan sejarah migrasi etnis Bugis, dari wilayah asalnya hingga akhirnya menetap di Kecamatan Kuala Jambi, menurut perspektif pelakunya. Penelitian ini juga menganalisis sistem pencaharian yang dikembangkan sehingga mampu menunjang penambahan aset yang dimiliki etnis Bugis. Proses bermigrasi dan beradaptasi hingga menguasai perekonomian dan sektor penting lain di perantauan terjadi tanpa adanya konflik dengan etnis lokal dan pendatang lainnya. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut.

## **MIGRASI ETNIS BUGIS DI BERBAGAI WILAYAH**

Kajian Lee (2007), yang terkait dengan faktor pendorong migrasi, menguraikan bahwa terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi. Keempat faktor tersebut terbagi atas faktor yang berasal dari daerah asal, faktor yang terdapat di daerah tujuan, faktor rintangan penghambat, dan faktor pribadi yang sangat erat dengan keputusan seseorang untuk melakukan migrasi ke daerah lain. Penelitian ini membahas sejarah migrasi yang dilakukan etnis Bugis dan sistem penghidupannya di lokasi perantauan.

### a. Sejarah Migrasi Etnis Bugis ke Wilayah Malaysia

Etnis Bugis telah dikenal sejak dahulu sebagai pelaku migrasi atau perantau yang melakukan mobilitas geografis ke daerah tertentu dengan beragam alasan. Migrasi ini didorong oleh budaya *siri* dan keengganan etnis Bugis untuk takluk di bawah penjajahan Belanda (Mansyur, 2016). Permulaan migrasi etnis Bugis terjadi sejak tahun 1669 karena jatuhnya pemerintahan Kesultanan Gowa ke tangan Belanda pada tahun 1667 (Lineton, 1975; Harun dkk., 2015). Kejatuhan Gowa ini terjadi karena perang saudara dengan Kerajaan Bone di bawah pimpinan Aru Palaka yang didukung oleh Belanda. Kejatuhan Kesultanan Gowa (Makassar) menyebabkan ditandatanganinya kesepakatan dengan pemerintah Belanda dalam Perjanjian Bungaya (Abdullah, 2017; Yani, 2018). Perjanjian ini berisi 29 aturan yang secara garis besar mengatur hal-hal seperti: monopoli yang berhak dimiliki oleh Belanda dalam bidang perdagangan rempah-rempah di kawasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara; Makassar harus melepaskan Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone; Aru Palaka dikukuhkan sebagai Raja Bone; serta Makassar harus menyerahkan seluruh bentengnya dan membayar semua biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada Belanda setiap tahunnya (Wiharyanto, 2008; Harun dkk, 2015; Abdullah, 2017; Yani, 2018). Isi lain dari perjanjian ini adalah rakyat Makassar hanya diperbolehkan melakukan pelayaran ke wilayah Bali, Jawa, Batavia, Batam, Jambi, Palembang, Borneo, dan Johor. Mereka dilarang untuk melakukan pelayaran ke wilayah Banda dan Maluku (Yani, 2018). Pelayaran yang mereka lakukan juga harus seizin Belanda. Rakyat Makassar yang tidak mau mematuhi perjanjian ini akhirnya melakukan migrasi dari Sulawesi Selatan. Pelayaran yang mereka lakukan melampaui dari wilayah yang diizinkan oleh Belanda. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dan rezeki yang lebih baik dibandingkan daerah asal yang kemudian dikenal dengan istilah *massapa dale* (*searching for good fortune*) (Ammarell, 2002).

Acciaioli (1986) mengungkapkan bahwa merantau yang dilakukan oleh etnis Bugis tidak hanya sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga

sebagai upaya untuk mencari pengetahuan, kekayaan, serta memperbaiki nasib. Bermigrasi menjadi salah satu cara bagi etnis Bugis untuk meraih status sosial yang lebih tinggi.

Pemberontakan Kahar Muzakar pada tahun 1965 juga mendorong peningkatan migrasi etnis Bugis keluar dari Sulawesi Selatan. Pemberontakan menyebabkan penderitaan bagi etnis Bugis karena ketiadaan jaminan keamanan sehingga mereka tidak berani untuk pergi ke sawah atau mengelola pertanian. Pilihan untuk bermigrasi ke Kalimantan Timur menjadi pilihan terbaik sebagai upaya untuk mencari kehidupan yang aman bagi mereka. Gelombang migrasi pertama yang mengubah kondisi kehidupan menjadi lebih baik akhirnya mendorong terjadinya gelombang migrasi kedua secara besar-besaran. Hal ini terjadi untuk mencapai keuntungan dan kemajuan sosial-ekonomi sehingga dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik (Vayda & Sahur, 1985).

Tachimoto (1994) mengungkapkan bahwa perantauan etnis Bugis hingga ke Semenanjung Malaysia di wilayah Johor telah mampu mengembangkan perekonomian dan budaya Bugis di daerah tersebut. Kedatangan etnis Bugis dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan konflik dengan penduduk lokal, yaitu etnis Melayu. Asimilasi budaya antara etnis Bugis dan etnis Melayu meskipun budaya Melayu lebih menonjol. Generasi pertama etnis Bugis yang bermigrasi ke Johor masih memegang teguh budaya Bugis terutama pada penggunaan bahasa Bugis dalam percakapan sehari-hari. Namun, generasi yang lebih muda memilih untuk mempergunakan bahasa Melayu dan tidak menunjukkan kemampuan penguasaan bahasa Bugis. Penelitian Tachimoto (1994) mengungkapkan bahwa dengan sejumlah keuntungan yang didapatkan sebagai etnis Melayu, maka sebagian besar keturunan etnis Bugis yang ada di wilayah ini lebih mengedepankan identitas sebagai etnis Melayu. Hal ini didasari atas pilihan rasional demi mencapai keuntungan bagi mereka. Keuntungan yang didapatkan salah satunya terkait dengan hubungan kerja sama ekonomi dengan etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa akan mengutamakan jalinan kerja sama ekonomi dan perdagangan

dengan etnis Melayu. Namun, aspek kehidupan sosial akan bersifat eksklusif dengan membatasi jalinan hubungan sosial dengan para nonetnis Tionghoa.

Ammarell (2002) menyatakan bahwa migran Bugis yang dikenal dengan istilah *pasompe* memiliki kemampuan untuk melakukan pelayaran hingga jauh dari tempat asalnya, bahkan hingga ke daerah terpencil atau wilayah perbatasan. Proses asimilasi akan terjadi di daerah yang didatangi oleh para perantau Bugis. Peranan sebagai agen asimilasi dalam kelompok-kelompok elite akan melekat dalam diri dan reputasi mereka sebagai pedagang yang ulet. Hal ini akan terlihat dari dominasi mereka dalam ekonomi lokal dan keteraturan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Perantau dari etnis Bugis ini akan mampu mengembangkan kekuatan politik dengan cara berafiliasi dengan pemerintah setempat. Mereka juga mampu memengaruhi sistem politik dan budaya ekonomi lokal dengan kekuatan politik yang mereka miliki. Pada masa Orde Baru, terjalin kedekatan yang erat antara etnis Bugis dengan penguasa Orde Baru. Fakta ini memicu terjadinya konflik sosial dan kekerasan seperti yang terjadi di Timor Timur (Timor Leste), NTT, Ambon, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat pascajatuhnya rezim Orde Baru (Ammarell, 2002). Hal ini terjadi juga karena populasi penduduk lokal telah berada dalam sistem sosial yang dikuasai etnis Bugis sehingga penduduk lokal mengalami marginalisasi ekonomi.

Penguasaan etnis Bugis dalam bidang ekonomi dilatarbelakangi oleh banyak hal. Sebelum berlangsungnya Perang Makassar pada tahun 1670, etnis Bugis telah menjelajahi samudra dan melakukan pelayaran dengan mempergunakan perahu pinisi untuk berdagang dari pesisir ke pesisir (Lampe, 2012). Menurut penelitian Lampe (2012), jejak pelayaran maritim yang dilakukan oleh etnis Bugis berkembang hingga ke berbagai wilayah didasarkan atas hal-hal berikut.

1. pengetahuan dan keterampilan navigasi yang dimiliki,
2. kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial budaya,
3. pemahaman akan konsep ruang perairan,
4. adanya keberanian untuk bertualang,

5. sikap kerja keras dan kompetitif yang dimiliki,
6. sikap moral yang baik terkait dengan kejujuran dan tanggung jawab,
7. religiositas, serta
8. dominasi kolektivisme yang menjadi nilai-nilai budaya yang melekat dalam diri perantau Bugis (Lampe, 2012).

Hal ini menyebabkan usaha perdagangan etnis Bugis berkembang pesat. Apalagi beragam komoditas yang mereka dagangkan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di wilayah tempat mereka berlayar. Budhi (2015) mengungkapkan bahwa masyarakat Bugis berpengaruh besar dalam perdagangan, pelayaran, dan industri kerajinan. Peranan mereka ini dipengaruhi oleh semangat sebagai pelaut ulung dan kemampuan untuk beradaptasi di daerah perantauan.

Penelitian Ammarell (2002), Sjaf (2009), Lampe (2012), dan Harun dkk. (2015), mengungkapkan bahwa wilayah pelayaran etnis Bugis terbentang hingga Australia, Madagaskar, dan Afrika. Wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia sejak dahulu juga sudah menjadi daerah tujuan pelayaran bagi perantau Bugis. Selain itu, wilayah Selangor, Kedah, dan Johor juga menjadi tujuan pelayaran ini. Penelitian Sjaf (2009) mengungkapkan bahwa perantauan hingga ke Johor bahkan mampu menempatkan etnis Bugis meraih posisi yang berpengaruh di Kesultanan Johor. Perantau Bugis yang berlayar hingga ke Johor akhirnya akan sampai ke wilayah Kuala Enok (Riau) dan memasuki wilayah Jambi Selatan.

## **b. Sejarah Migrasi Etnis Bugis ke Jambi**

Penelitian Harun dkk. (2015) juga mengungkapkan bahwa perantau Bugis memengaruhi budaya teknik memotong pohon dan membakar lahan yang ada dengan sistem penanaman padi, penanaman pohon kelapa, pembuatan besi, hingga penggunaan kuda. Hal tersebut terlihat dalam sistem pertanian masyarakat di Kuala Enok dan Jambi. Keberadaan etnis Bugis di tanah Sumatra memengaruhi budaya masyarakat Melayu sebagai penduduk asli di pulau Sumatra. Sejarah perkembangan masyarakat Melayu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh etnis Bugis (Harun dkk., 2014).

Lineton (1975) mengungkapkan bahwa migrasi etnis Bugis utamanya dilakukan oleh mereka yang berasal dari wilayah Wajo ke daerah Jambi. Selain berpengaruh terhadap pembangunan daerah pemukiman, migrasi etnis Bugis juga berdampak terhadap kelangsungan beberapa fungsi institusional dalam masyarakat Bugis. Fungsi tersebut terkait dengan aspek sistem stratifikasi sosial dan ikatan bilateral yang kuat. Kuatnya ikatan tersebut didasari rasa solidaritas yang tinggi karena perasaan senasib di perantauan. Pengaruh etnis Bugis di Jambi mampu mendorong terjadinya perubahan lahan dari hutan menjadi sawah dan kebun kelapa. Manfaat merantau lainnya yang mereka alami adalah mampu mengurangi persaingan dalam pembagian hasil pengolahan sawah di daerah asal, meningkatnya rasa solidaritas di daerah asal, hingga mampu memengaruhi keberadaan sistem politik yang autokrasi dan feodalisme yang masih berlaku di daerah asal (Lineton, 1975).

Pola migrasi yang dilakukan oleh etnis Bugis ini disesuaikan dengan musim panen di daerah asal. Pelaksanaan migrasi menuju Jambi akan dilakukan pada saat selesai musim panen di daerah asalnya, yaitu di wilayah Sulawesi Selatan. Uang yang diperoleh dari hasil panen menjadi bekal perjalanan bermigrasi. Jika usaha perkebunan yang dilakukan di Jambi berhasil, maka mereka akan pulang ke Wajo untuk kemudian kembali lagi ke Jambi dengan mengajak saudara mereka untuk ikut bermigrasi (Lineton, 1975). Pola ini berpengaruh pada peningkatan jumlah migran Bugis di pulau Sumatra, khususnya di Riau dan Jambi.

Keterlibatan etnis Bugis dalam jaringan perekonomian di daerah migrasi tidak diragukan lagi. Migrasi yang dilakukan oleh nenek moyang mereka semula bertujuan untuk mencari keamanan, tetapi sekarang memiliki tujuan yang berbeda. Pencapaian kehidupan yang lebih baik dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang didasarkan atas pilihan rasional menjadi tujuan migrasi etnis Bugis (Vayda & Sahur, 1985).

Penelitian Mulyoutami dkk. (2016) mengungkapkan bahwa pola migrasi etnis Bugis ditandai dengan adanya perintis migrasi yang

pada awalnya membuka jalur migrasi ke wilayah-wilayah tertentu. Keberadaan perintis migrasi yang telah lama pindah dan menetap di wilayah baru dalam jangka waktu yang lama akan membuka jaringan bagi perantau Bugis untuk melakukan migrasi di wilayah yang sama. Pola migrasi tersebut didukung oleh jaringan kekeluargaan yang melandasi adanya jalinan hubungan *patron klien*. Di samping itu, terkadang migrasi juga dilakukan karena perpindahan tempat kerja.

Pilihan untuk melakukan migrasi yang dilakukan oleh etnis Bugis didasarkan pada kondisi lingkungan sehingga mendorongnya untuk mengambil suatu tindakan yang menguntungkan bagi dirinya dan keluarganya. Perintis migrasi awal etnis Bugis pada masa prakemerdekaan memilih migrasi sebagai bentuk pilihan rasional untuk menjaga harga diri yang tidak mau dikekang oleh penjajah. Migrasi dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan tradisi yang berkaitan dengan prinsip *siri*, *pesse*, dan *ade* yang diwariskan secara turun-temurun sebagai suatu prinsip hidup dan tidak terbantahkan oleh siapapun (Harun dkk. 2015). Pilihan bermigrasi menjadi cara untuk menegakkan prinsip ini. Migrasi merupakan suatu bentuk pilihan rasional untuk mencari pencaharian yang lebih baik setelah mengalami kondisi ekonomi dan sosial yang tidak memuaskan di daerah asal.

## KAJIAN UMUM TENTANG SISTEM PENGHIDUPAN (*LIVELIHOOD SYSTEM*)

Upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mempertahankan, serta mengembangkan kehidupannya berkaitan dengan konsep pencaharian. Penghidupan atau *livelihood* merupakan upaya yang dilakukan individu untuk memperoleh penghasilan, yang meliputi kapabilitas, aset terhitung, dan aset tidak terhitung seperti klaim dan akses (Chambers & Conway, 1992). Kapabilitas dan aset dikembangkan sebagai dukungan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Livelihood* didefinisikan sebagai aset-aset, aktivitas, dan akses yang mencerminkan tambahan pendapatan oleh individu atau rumah tangga (Ellis, 1999). Chambers dan Conway (1992) mengungkapkan juga bahwa *livelihood*

merupakan akses yang dimiliki oleh individu atau keluarga. Akses menunjukkan aturan atau norma sosial yang menentukan perbedaan kemampuan manusia untuk memiliki dan mengendalikan penggunaan sumber daya seperti lahan dan kepemilikan umum untuk kepentingan sendiri. *Livelihood* berperan penting dalam menunjang upaya pemulihan atau perbaikan dari kondisi guncangan, mendukung kemampuan pemeliharaan aset dan ketahanan dalam menyediakan peluang, serta memberikan manfaat jangka pendek atau panjang kepada generasi mendatang dalam skala lokal. Aspek kehidupan dan pencaharian fokus pada kemampuan mengatasi kesulitan akibat guncangan yang dialami individu (Scoones, 1998; Chambers & Conway, 1992).

Sistem pencaharian terkait dengan aspek nafkah, strategi nafkah, dan struktur nafkah, sedangkan unsur-unsur dalam strategi *livelihood* menurut Chambers dan Conway (1992) adalah kapabilitas, aset, dan aktivitas. Aset dapat berupa klaim atau akses. Kapabilitas menunjukkan kemampuan individu untuk mewujudkan potensi dirinya sebagai manusia dalam artian menjadi dan menjalankan. Kapabilitas menunjukkan set alternatif menjadi dan melakukan sesuatu sesuai dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan personal manusia. Aktivitas merujuk pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Strategi *livelihood* tergantung dari seberapa besar aset yang dimiliki, kapabilitas individu, dan aktivitas yang nyata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Strategi pencaharian ini terkait dengan strategi adaptasi yang dilakukan oleh tiap individu dalam situasi yang mengguncang kehidupannya. Kemampuan dalam beradaptasi dan bertahan hidup akan menunjang individu untuk meningkatkan strategi kehidupannya. Kajian mengenai strategi adaptasi diungkapkan oleh Ahimsa-Putra (2003). Ahimsa-Putra (2003) menyatakan bahwa strategi bertahan hidup lebih identik dengan pola adaptasi individu dalam menghadapi persoalan di sekitarnya sehingga lebih dikenal dengan strategi adaptasi.

Ellis (1999) mengungkapkan bahwa strategi nafkah merupakan serangkaian pilihan sumber dan aktivitas nafkah yang meliputi beragam

tindakan rasional dan diambil oleh suatu rumah tangga untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pemanfaatan penggunaan sumber daya atau aset. Strategi bertahan hidup yang dilakukan petani terkait erat dengan pengembangan strategi nafkah. Kemampuan petani dalam mengembangkan kelangsungan hidup transmigran didukung oleh kemampuan untuk mampu melakukan diversifikasi strategi nafkah.

Strategi nafkah yang dilakukan masyarakat sering kali tidak hanya meliputi satu bidang saja. Strategi nafkah yang dikembangkan masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk. Bentuk strategi nafkah tersebut meliputi rekayasa sumber nafkah pertanian, pengembangan pola nafkah ganda, dan melakukan migrasi atau rekayasa spasial (Scoones, 1998). Upaya memperoleh nafkah yang dilakukan masyarakat bisa berupa melakukan pekerjaan lain di bidang yang bukan merupakan pekerjaan kesehariannya, seperti masyarakat petani yang memiliki strategi nafkah dengan melakukan pekerjaan di bidang nonpertanian (Fridayanti & Dharmawan, 2013). Strategi nafkah juga kerap dilakukan masyarakat sebagai upaya mengatasi keterbatasan sumber daya alam yang sering kali membatasi upayanya untuk melakukan berbagai kegiatan guna memperoleh nafkah (Tridakusumah dkk., 2016). Strategi nafkah yang dilakukan juga dapat berupa adanya pola nafkah ganda yang dilakukan oleh seseorang. Pola nafkah ganda merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan beragam pola nafkah seperti melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan utamanya, serta melibatkan anggota keluarga lainnya untuk turut mencari nafkah (Scoones, 1998; Scoones, 2009). Pola nafkah ganda selama ini telah dilakukan oleh petani (Fridayanti & Dharmawan, 2013). Pola nafkah ganda dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari berbagai sumber nafkah yang ada.

Masyarakat yang mengalami proses perpindahan secara geografis terkadang juga akan mengalami perubahan cara mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nafkah merupakan mata pencarian yang terdiri dari lima modal atau aset, kegiatan, dan akses

masuk (dimediasi oleh lembaga dan hubungan sosial) yang secara bersamaan menentukan kehidupan individu atau rumah tangga (Ellis, 1999). Dharmawan (2007) menguraikan bahwa kajian sosiologi nafkah mengarah pada strategi penghidupan (*livelihood strategy*). Sistem penghidupan migran etnis Bugis di lokasi perantauan sangat terkait dengan kemampuannya dalam mengembangkan strategi nafkah dan memanfaatkan jaringan modal sosial yang berkembang dalam masyarakat di perantauannya.

### **INTERAKSI DAN MODAL SOSIAL DALAM KOMUNITAS ETNIS BUGIS DI PERANTAUAN**

Interaksi sosial atau hubungan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hubungan sosial adalah tindakan yang dilakukan manusia satu sama lain berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Hubungan sosial dapat terjalin antarindividu, individu dengan kelompok, dan antarkelompok (Arisandi, 2015).

Lokasi etnis perantau bermigrasi juga merupakan kawasan yang memiliki etnis yang berbeda-beda. Etnis perantau yang sangat menonjol dalam migrasi internal di Indonesia adalah etnis Jawa, Minangkabau, Batak, dan Bugis. Proses migrasi etnis tersebut pada awalnya berbeda. Pada awalnya, etnis Jawa melakukan migrasi dengan paksaan pemerintah (*forced migration*). Hal ini terjadi pada masa penjajahan Belanda dengan program *kolonisatie* yang kemudian menjadi cikal bakal program transmigrasi.

Berbeda halnya dengan etnis Batak, Bugis, dan Minangkabau yang melakukan migrasi dengan inisiatif sendiri (*spontaneous migration*) karena berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berupa kondisi lingkungan yang tidak mampu mendukung upaya kelangsungan hidupnya sehingga terjadi keterbatasan sumber daya alam yang mampu diolah. Di sisi lain, terdapat faktor budaya. Faktor budaya dapat berwujud adanya budaya merantau pada etnis Minangkabau dan Batak. Terdapat pula faktor sosial seperti konflik internal, peperangan, dan keinginan untuk meraih status sosial yang lebih tinggi. Sjaf (2009) mengungkapkan bahwa migrasi bagi etnis Bugis tidak hanya menyangkut aspek ekonomi semata. Na-

mun terkadang juga berkaitan dengan persoalan nonekonomi, seperti tidak adanya ketenteraman jiwa, kehilangan kemerdekaan, dan falsafah yang dipegangnya adalah jiwa yang merdeka.

Etnis Bugis di lokasi perantauan melakukan hubungan sosial dengan etnis lainnya demi mencapai tujuan migrasinya (Harun dkk., 2015). Hubungan sosial ini dijalin dalam bentuk perluasan dan peningkatan modal sosial etnis Bugis di perantauan.

Modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan kuat berupa hubungan timbal balik pengenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan (Field, 2003; Field, 2010). Modal sosial berperan penting dalam proses sosial masyarakat, terutama terkait dengan permasalahan jaringan dan hubungan timbal balik yang terjalin dalam masyarakat. Modal sosial juga memiliki penekanan dalam beberapa hal, yaitu jaringan, kepercayaan, norma, dan tindakan sosial. Hal ini memengaruhi perkembangan modal sosial, bahkan dalam kehidupan masyarakat yang sedang berkembang.

Modal sosial utama berasal dari kekuatan sosial komunitas masyarakat dan dinilai mampu mengatasi semua persoalan yang mungkin terjadi dalam komunitas. Peranan tersebut juga mencakup masyarakat di perantauan yang mengandalkan keterikatan latar etnis dan budaya yang sama sebagai pemersatu dan pemberi dukungan untuk mencapai tujuan dan kepentingan di lokasi yang baru. Modal sosial menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya pelaku migrasi untuk mengembangkan strategi nafkah demi kelangsungan hidupnya di lokasi migrasi.

Modal sosial berperan penting dalam kehidupan pelaku migrasi yang berada jauh dari daerah asalnya. Hal ini diuraikan dari beberapa penelitian berikut. Penelitian Jumadi (2016) mengungkapkan tentang peran modal sosial dalam etnis Madura yang bermigrasi ke Makassar. Modal sosial berkembang dalam kehidupan perantau Madura yang bermigrasi ke Makassar dan melakukan pekerjaan sebagai tukang potong rambut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Modal sosial utama yang berkembang adalah ke-

percayaan dan norma. Masyarakat yang berada di lokasi migrasi dengan etnis yang berbeda mampu menaruh kepercayaan terhadap etnis Madura karena melihat etos kerja, perilaku yang baik, serta dapat bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya. Modal sosial yang berkembang mampu mendukung perantau Madura mencapai tujuan yang diinginkan dengan bermigrasi ke Makassar. Kehidupan masyarakat yang heterogen tidak membatasi upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan bermigrasi.

Penelitian Wartiharjono (2017) mengungkapkan mengenai keberadaan modal sosial dalam kehidupan transmigran dan penduduk asli, yaitu suku Paser di Kalimantan Timur. Modal sosial mampu menghubungkan interaksi dan kerja sama yang erat antara transmigran etnis Jawa dengan etnis asli di lokasi transmigrasi. Kesamaan nilai yang dianut, yaitu nilai kebersamaan, kesejajaran, dan gotong royong, mampu membentuk kepercayaan di antara kedua etnis. Kepercayaan yang berkembang mendorong terciptanya kerja sama di bidang pengelolaan perkebunan antarindividu dari etnis yang berbeda.

Peranan modal sosial dalam eksistensi perantau Bugis di Pulau Sebatik mampu menyebabkan etnis Bugis menguasai perekonomian di wilayah tersebut. Penelitian Saleh (2015) mengungkapkan tentang kemampuan perantau Bugis dalam menciptakan dan mengelola sumber-sumber ekonomi yang dibarengi dengan kemampuan membangun relasi, baik ekonomi maupun sosial, sebagai upaya turut berpartisipasi dalam pembangunan di pulau Sebatik. Perantau Bugis mampu memanfaatkan jaringan sosial yang ada di lokasi perantauan untuk mewujudkan impiannya, yaitu meningkatkan taraf hidup. Jaringan sosial tersebut terjalin tidak hanya antara sesama perantau Bugis saja, tetapi juga dengan perantau etnis lainnya serta penduduk asli. Jaringan sosial yang didukung oleh kerja keras perantau Bugis, mampu membuat mereka menghadapi semua tantangan hingga dapat menguasai sumber ekonomi penting di Pulau Sebatik. Modal sosial dalam bentuk jaringan sosial yang kuat dapat menunjang kesuksesan perekonomian perantau Bugis (Saleh, 2015).

Kesimpulan dari berbagai penelitian tersebut mengungkapkan bahwa modal sosial tidak bisa dipisahkan dari individu yang melakukan proses sosial. Keberadaan modal sosial dinilai penting dalam mendukung upaya perantau untuk bertahan hidup di lokasi migrasinya. Aspek modal sosial umum yang terdiri dari kepercayaan, nilai dan norma, serta jaringan sosial, berkembang dalam kehidupan migran di lokasi migrasinya. Peranan modal sosial dalam kehidupan mereka sangat berkaitan dengan upaya mengembangkan mata pencarian serta pengambilan keputusan untuk bertahan atau meninggalkan lokasi migrasi sebagai mekanisme pengembangan sistem penghidupan. Efektivitas modal sosial dalam masyarakat diasumsikan akan mendukung keberhasilan pelaku migrasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

#### **ADAPTASI EKOLOGI DAN ADAPTASI SOSIAL BUDAYA DALAM KEHIDUPAN PELAKU MIGRASI**

Adaptasi ekologi merupakan proses penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan agar terjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara organisme dengan lingkungannya (Abdoellah, 2017). Manusia dalam kehidupannya selalu melakukan proses adaptasi sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan agar mampu bertahan dalam menghadapi hambatan yang ada dari lingkungan. Adaptasi manusia dalam kehidupannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hubungan yang erat antara lingkungan dengan kebudayaan manusia menentukan jenis dan strategi adaptasi yang berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapi (Abdoellah, 2017). Manusia memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi sosial budaya sehingga mampu mengembangkan upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Proses adaptasi ekologi yang dilakukan masyarakat sangat tergantung pada keberadaan lingkungan yang mendukung upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Daya dukung lingkungan, terutama lahan pertanian, memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat pertanian. Daya dukung lingkungan merupakan sekumpulan materi,



energi, dan informasi yang bisa dihasilkan dari ruang hidup tertentu untuk kelangsungan hidup dan perkembangbiakan populasi (Abdoellah, 2017). Daya dukung lingkungan diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan manusia.

Kajian Santo (1978) mengenai daya dukung mengungkapkan bahwa daya dukung lingkungan adalah ketersediaan sumber daya secara terus-menerus dalam mendukung keberadaan komponen jumlah binatang, manusia, atau industri yang ada (*indefinitely*). Daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan manusia juga mengalami penurunan karena migrasi (Widodo dkk., 2015). Kemampuan lahan untuk memberikan dukungan kepada manusia juga sangat terkait dengan aktivitas yang dilakukan terhadap lahan tersebut. Pengembangan lahan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan manusia perlahan-lahan beralih dari fungsi awal sebagai lahan pertanian pangan menjadi lahan tanaman industri. Kondisi ini terjadi di beberapa wilayah yang mengalami proses industrialisasi dan modernisasi, serta perubahan pemanfaatan lahan untuk tujuan nonpertanian, seperti lahan yang dijadikan kawasan wisata atau pemukiman (Moniaga & Vicky, 2011). Pelaku migrasi akan melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Proses adaptasi sosial budaya juga dikembangkan untuk mendukung upaya pelaku migran dalam mengembangkan strategi adaptasi di lokasi baru. Proses adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu upaya yang dikembangkan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan. Migran yang tidak mampu untuk mengembangkan pola adaptasi di lingkungan sosial budaya yang baru, akan mengalami kondisi ketertinggalan dibandingkan migran lainnya (Kristiawan dkk., 2017).

Keterkaitan penduduk beserta aspek organisasi sosial dan teknologi yang mendukung kehidupannya dengan lingkungan, merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kajian ekologi manusia. Pandangan Poston dan Frisbie (2005) menyebutkan bahwa ekologi manusia terdiri dari empat komponen penting ekosistem manusia, yaitu: *Population, Organization, Environment,*

*Technology (POET)*. Keempat komponen itu merupakan hal yang penting dalam mendukung pengembangan sistem penghidupan migran dan upayanya untuk bertahan di lokasi perantauannya.

Pola adaptasi yang tepat akan mampu mendukung proses pengembangan strategi adaptasi. Namun, hal ini juga membutuhkan dukungan hubungan sosial yang harmonis dengan komunitas lain yang berada di lokasi migrasi. Kemampuan menjalin hubungan sosial dengan baik akan mendukung strategi migran etnis Bugis dalam mengembangkan sistem penghidupannya. Adaptasi ekologi terhadap lingkungan baru mendukung upaya pengembangan sistem pertanian demi memenuhi kebutuhan hidup. Kajian proses adaptasi ekologi yang dilakukan etnis Bugis di perantauan, dilakukan dengan mengembangkan sistem pertanian di daerah atau lahan pertanian dengan kondisi lahan gambut atau rawa-rawa. Pengembangan sistem penghidupannya dilakukan dengan penggabungan dua jenis strategi nafkah. Hal ini mendukung keberhasilan etnis Bugis untuk bertahan di lokasi perantauan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data-data kuantitatif dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang didukung oleh panduan wawancara semi terstruktur dan dilengkapi dengan observasi partisipan. Kuesioner dan penggalian *life history* informan juga digunakan untuk proses melengkapi data

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan adanya komunitas etnis Bugis yang tersebar di berbagai wilayah Kecamatan Kuala Jambi. Namun, fokus lokasi pengumpulan data dilakukan pada dua kelurahan, yaitu Kelurahan Kampung Laut dan Kelurahan Tanjung Solok. Kedua wilayah ini mewakili kondisi ekologi yang berbeda, yaitu wilayah pesisir dan pertanian lahan gambut. Perbedaan lokasi ini berperan penting dalam menganalisis sistem penghidupan yang dikembangkan oleh etnis Bugis.

## TEMUAN DAN DISKUSI

### Sejarah Migrasi Etnis Bugis di Jambi

Harun dkk. (2015) mengungkapkan bahwa sejarah kedatangan etnis Bugis ke wilayah Jambi bermula sejak tahun 1950-an, setelah Indonesia merdeka. Kondisi yang tidak stabil terjadi karena perebutan kekuasaan lokal setelah Indonesia merdeka. Ini dilakukan oleh para pemberontak yang ingin menguasai wilayah Indonesia yang telah ditinggalkan penjajah. Informasi ini juga diungkapkan oleh Bapak MGR (78 tahun), yang menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, terjadi Pemberontakan Kahar Muzakar. Peristiwa ini menyebabkan banyak warga yang ketakutan akan dibunuh oleh pemberontak sehingga pada akhirnya bermigrasi ke luar wilayah Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, MGR menuturkan bahwa pada umumnya sebelum menuju ke wilayah Jambi, para perantau tersebut terlebih dahulu melakukan migrasi ke wilayah lain yang ada di nusantara. Bahkan hingga ke wilayah Malaysia dan Singapura.

Pemberontakan Kahar Muzakar yang menjadi alasan migrasi etnis Bugis juga diungkapkan oleh Hj. S (77 tahun). Hj. S menuturkan bahwa meletusnya Pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan menyebabkan sejumlah masyarakat ingin mencari keamanan dan kondisi kehidupan yang lebih baik sehingga memutuskan untuk bermigrasi.

Jalur migrasi yang dilalui sangat tergantung pada arah perahu layar yang mereka tumpangi. Perahu layar ini menelusuri jalur-jalur perdagangan yang sebelumnya telah dirintis oleh perantau sebelum mereka. Tujuan utama pelayaran adalah wilayah Malaysia. Wilayah ini ditetapkan berdasarkan informasi dari perantau sebelumnya, bahwa terdapat pemukim yang berasal dari Sulawesi dan telah berhasil memperoleh kehidupan yang lebih baik. Wilayah Malaysia selanjutnya yang menjadi tujuan perantauan adalah wilayah Johor, Sabah, dan juga wilayah Singapura. Selama menelusuri jalur menuju ke Malaysia, terdapat juga beberapa perantau Bugis yang melaukan pekerjaan berdagang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Pada akhirnya,

ada beberapa di antara mereka yang memutuskan untuk menetap di wilayah yang disinggahi oleh kapal tumpangnya. Daerah yang mereka singgahi seperti wilayah Kalimantan Selatan, Surabaya, Jakarta, wilayah Sumatra Utara yang mencakup daerah Bagan Siapi-api, dan wilayah Riau yang meliputi daerah Tanjung Pinang dan Indragiri, khususnya Kuala Enok. Wilayah Kuala Enok pada akhirnya menjadi tempat bermukim perantau Bugis dalam jumlah besar.

Kuala Enok menjadi wilayah terakhir untuk mengupayakan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Hal ini dikarenakan kondisi alam Kuala Enok dinilai cocok untuk menanam kelapa dan pinang. Selain itu, Bapak MAR (73 tahun), yang juga merupakan informan, mengungkapkan bahwa Kuala Enok dipilih sebagian besar perantau Bugis untuk tempat menetap karena masih terdapat banyak tanah yang tidak bertuan, sehingga dapat dengan mudah untuk dimiliki. Tanah tersebut kemudian diolah menjadi perkebunan kelapa dan pinang.

Sebagian dari perantau yang telah berhasil di Kuala Enok akan pulang ke Sulawesi setelah kondisi dinilai aman dan maju. Kepulangan mereka dengan membawa informasi mengenai peluang ekonomi di tanah Sumatra, mendorong perantau lainnya untuk bermigrasi juga dengan tujuan mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik dan kekayaan yang mungkin akan didapatkan. Beberapa perantau juga memutuskan untuk mencoba peruntungan mereka di wilayah lain. Wilayah tersebut adalah daerah Kuala Jambi dengan wilayah-wilayah seperti Tungkal, Nipah Panjang, Mendahare, Teluk Bengkalis, Kuala Lagan, Muara Sabak, Ranau, dan Sungai Cambang. Di daerah-daerah tersebut, para perantau memiliki lahan perkebunan. Ketika berpindah ke daerah lain, lahan-lahan tersebut dijual kepada perantau lainnya dan membeli lahan baru di daerah tujuan yang baru. Ada juga perantau yang tidak menjual lahannya sehingga ketika sampai di tempat tujuan baru, hasil panen dapat terus dinikmati dari lahan yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi, aset kebun atau tanah yang dimiliki semakin bertambah banyak.

Perantau yang terus mencari lingkungan tempat tinggal yang lebih baik akhirnya menetap

di wilayah Kampung Laut dan Tanjung Solok pada saat ini. Wilayah Kampung Laut dan Tanjung Solok merupakan wilayah pesisir yang mengutamakan sistem ekonomi perdagangan dan pemanfaatan jalur air sebagai transportasi utama menuju ke berbagai wilayah sebelum adanya jalan raya. Perpindahan mereka ke wilayah Kampung Laut dan Tanjung Solok merupakan pilihan yang dinilai terbaik dari sejumlah tempat tinggal yang sebelumnya ditinggahi. Keberadaan perintis awal yang telah datang terlebih dahulu di daerah perantauan menjadi tonggak pembuka untuk kedatangan migran berikutnya ke wilayah yang sama. Migrasi etnis Bugis ke wilayah Kuala Jambi merupakan alur atau tujuan migrasi terakhir. Keberhasilan yang telah diraih akan mendorong perpindahan sanak keluarga dari wilayah Sulawesi Selatan ke Kuala Jambi. Pola migrasi yang terjadi mengungkapkan bahwa proses perpindahan sebelumnya dilakukan dalam tiga daerah tujuan dan setelah itu diputuskan untuk bermukim di Kuala Jambi. Keberhasilan yang diraih akan mendorong proses pembelian lahan atau tanah pertanian, serta rumah di beberapa wilayah lain yang berdekatan seperti di Kota Jambi. Bahkan ada informan yang memiliki rumah di Kota Palembang. Keberhasilan ini juga mendorong mereka untuk memperbaiki kondisi rumah di tempat asalnya yang berada di daerah Wajo atau Sulawesi Selatan. Kondisi rumah akan diperbaiki dan diperluas demi kenyamanan keluarga yang masih menetap di daerah asal.

### **Jalinan Hubungan Sosial dalam Kehidupan Etnis Bugis di Kuala Jambi**

Hubungan sosial terjalin dengan baik dalam kehidupan bertetangga antara warga Bugis dengan warga lainnya di Kampung Laut dan Tanjung Solok. Pemukiman yang mereka tempati memiliki variasi etnis dengan latar belakang kondisi sosial ekonomi yang beragam pula. Etnis Bugis yang bertempat tinggal di wilayah ini juga tidak semuanya memiliki lahan pertanian atau kebun. Mereka yang memiliki kebun walaupun dalam ukuran yang kecil akan memiliki kebanggaan tersendiri dibandingkan mereka yang tidak memiliki kebun. Warga Kampung Laut dan Tanjung Solok yang berasal dari etnis Duano atau

etnis Melayu umumnya tidak memiliki lahan, khususnya jika mereka merupakan warga yang sebelumnya bermigrasi ke Kampung Laut dan Tanjung Solok. Penduduk asli dari suku Duano dan etnis Melayu telah bermukim di wilayah Kampung Laut dan Tanjung Solok sebelum kedatangan etnis Bugis atau etnis perantau lainnya seperti etnis Jawa, Banjar, Madura, Tionghoa, Minang, Melayu Kerinci, dan Batak. Etnis Duano pencaharian sebagai nelayan, sedangkan etnis Melayu bercocok tanam. Kedatangan etnis Bugis di wilayah Kampung Laut mengubah pola mata pencarian etnis Duano dan Melayu. Etnis Duano perlahan tersingkir dari laut yang menjadi wilayah pencaharian utama mereka. Keterbatasan mereka dalam kepemilikan aset ekonomi dan modal usaha, menyebabkan mereka perlahan-lahan menjadi pekerja di unit usaha perikanan yang dimiliki etnis Bugis. Kondisi yang dialami oleh etnis Melayu sedikit berbeda dengan yang dialami oleh etnis Duano. Penguasaan etnis Melayu atas tanah dan lahan leluhur mereka menyebabkan mereka memiliki posisi tawar dalam jalinan interaksi sosial dengan etnis Bugis dan etnis pendatang lainnya. Terdapat pemahaman umum yang berkembang dalam masyarakat Kampung Laut tentang keberadaan etnis Melayu, yaitu bahwa sektor perdagangan, perikanan, dan perkebunan boleh dikuasai oleh etnis Bugis, Tionghoa, Minang, dan etnis lainnya. Namun, persoalan pemerintahan atau penempatan pimpinan dalam satu wilayah desa atau kecamatan merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh etnis Melayu. Jadi, jika ada etnis Bugis atau etnis Jawa yang juga ingin memegang jabatan, umumnya mereka hanya akan menjadi wakil saja. Informan mengungkapkan bahwa urusan perekonomian membuka peluang bagi warga untuk berusaha dan berkompetisi secara terbuka. Sementara itu dalam urusan pemerintahan, wilayah Kampung Laut masih belum terbuka dalam memberikan peluang bagi warga Bugis untuk terlibat dalam penguasaan politis terhadap warga lain, terutama etnis Melayu. Pola hubungan sosial yang terjalin seperti ini di wilayah Kampung Laut telah berkembang sejak dulu hingga sekarang. Adaptasi terhadap kondisi pendatang di wilayah laut dilakukan dengan tidak menyentuh aspek politik dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa

generasi muda asal Kampung Laut yang tertarik untuk terlibat di ranah politik cenderung memilih ruang lingkup yang lebih luas, seperti mencoba mencalonkan diri sebagai caleg DPRD atau DPR RI. Pemuda Kampung Laut yang terlibat dalam aktivitas politik ini berasal dari etnis Bugis yang memperoleh pendidikan di Jambi dan di Pulau Jawa. Keterlibatan mereka di ranah politik tentu dengan membawa dukungan masyarakat Kampung Laut. Hanya saja beberapa orang tidak berhasil mendapatkan suara yang cukup untuk dapat terpilih sebagai anggota dewan. Pemuda etnis Bugis lainnya juga aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi partai politik, seperti KNPI dan Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan dukungan masyarakat terhadap perolehan suara untuk PAN sangat besar di wilayah Kampung Laut dan Tanjung Solok.

Hal yang sama juga terjadi pada pemuda yang berasal dari etnis Melayu atau etnis lainnya yang telah memperoleh pendidikan tinggi. Mereka akan terlibat dalam proses sosial di daerah, tetapi terkadang ada juga yang memilih untuk bekerja dan mencari penghidupan di kota dan meninggalkan daerah. Hubungan sosial yang terjalin di Kampung Laut antara etnis pendatang Bugis dengan etnis asli Melayu dan Duano cukup harmonis. Walaupun dalam situasi tertentu masih terdapat konflik atau perselisihan individu antar-etnis yang sifatnya insidental, misal perkelahian antarpemuda etnis Bugis dan Melayu karena pengaruh saling ejek dan saling merendahkan kepribadian etnis tertentu.

Hal yang umum berkembang dalam kehidupan masyarakat di Kampung Laut yaitu adanya stereotip bahwa etnis Melayu pemalas, hanya suka membual, dan berperilaku atau berpakaian yang tidak sesuai dengan kondisi perekonomian yang mereka miliki, misalnya mereka tergolong dalam keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, tetapi berpenampilan layaknya orang kaya.

Kondisi etnis Melayu yang bersikap sangat santai dalam menjalani kehidupan sehari-hari terlihat dari aktivitas keseharian mereka yang lebih banyak dihabiskan untuk bersosialisasi di warung atau kedai yang menjadi tempat berkumpulnya warga Melayu. Sementara itu etnis Bugis terlihat masih menimbang ikan yang didapatkan hingga

malam hari untuk dijual ke pembeli esok harinya. Meskipun begitu stereotip tentang kehidupan etnis Bugis dalam pandangan masyarakat Kampung Laut, pada umumnya dinilai sangat hemat dan cenderung pelit. Etnis Bugis juga lebih sering menampilkan kondisi seolah-olah mereka tidak mampu atau miskin, padahal sesungguhnya memiliki lahan atau kebun yang luas. Pandangan ini berkembang dalam masyarakat Kampung Laut dan jalinan kerja sama dalam berbagai bidang. Hal ini yang kerap kali membuat etnis Bugis tidak mempekerjakan etnis Melayu dalam bidang pertanian. Etnis Melayu juga cenderung tidak memercayai kondisi perekonomian etnis Bugis yang umumnya ditandai dengan tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan raskin bagi etnis Bugis. Hal ini dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan oleh sebagian etnis Bugis yang merasa layak untuk menerima kedua hal tersebut. Namun, sebagian lagi beranggapan bahwa memang seharusnya mereka tidak layak mendapatkannya karena kondisi mereka yang masih mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anak dan biaya keperluan keluarga sehari-hari. Pandangan bahwa semua etnis Bugis kaya dan memiliki lahan luas menyebabkan peluang diskriminasi terjadi dalam kehidupan sosial mereka. Padahal mereka selaku orang miskin membutuhkan pengakuan, serta layak mendapatkan raskin dan KIP bagi anak-anak mereka untuk bersekolah.

Konflik terbuka antarkelompok etnis tidak pernah terjadi di Kampung Laut. Hanya konflik perseorangan yang terjadi akibat permasalahan pribadi dan tidak dilatarbelakangi oleh alasan etnis. Kerja sama antaretnis juga kerap terjadi, misal dalam kegiatan membangun rumah atau merenovasi rumah etnis Bugis atau etnis Melayu. Pada umumnya, pekerja atau tukang bangunan yang dipekerjakan berasal dari etnis Jawa.

### **Sistem Penghidupan Etnis Bugis di Kuala Jambi**

Warga Bugis yang merupakan pendatang di wilayah Kuala Jambi akan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena mereka menyadari kondisi sebagai pendatang

membutuhkan kerja keras supaya dapat bertahan hidup di daerah yang baru. Etos kerja yang dimiliki warga Bugis mendorong mereka untuk bekerja keras demi memperoleh penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Kedatangan etnis Bugis ke wilayah Jambi berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Lahan-lahan perkebunan awalnya dikuasai oleh etnis Melayu dan sebagian ada juga lahan milik negara atau *pesirahan* yang dikelola oleh *pesirah*. Etnis Bugis datang dan membeli lahan dari *pesirah*, serta ada juga yang membeli lahan dari etnis Melayu. Lahan yang mereka beli pada awalnya ditanami padi. Namun, karena adanya hama berupa babi hutan maka mereka beralih menanam kelapa dan pinang yang lebih cocok untuk lahan di wilayah Jambi. Pola pengelolaan kebun etnis Bugis senantiasa melibatkan keluarga mereka dan terkadang juga mempekerjakan etnis Jawa, Banjar, atau etnis lainnya yang dinilai mampu bekerja untuk membantu proses panen atau pascapanen kebun mereka. Sistem upah yang diterapkan pada awalnya adalah sistem bagi lahan atau bagi tanah, kemudian berubah menjadi sistem bagi hasil. Pada akhir-akhir ini juga diterapkan sistem sewa lahan.

Bapak MUS (56 tahun) menjelaskan bahwa sistem bagi lahan atau bagi tanah merupakan cara pengelolaan kebun atau lahan yang dimiliki secara kekeluargaan antara orang pemilik tanah dengan orang lainnya yang tidak memiliki tanah. Pihak yang tidak memiliki tanah akan diberikan keleluasaan untuk mengolah seperempat atau setengah bagian dari tanah tersebut. Setelah dua kali masa panen, maka tanah yang dikelola tersebut dapat dimilikinya. Kepemilikan berpindah tangan secara resmi dan disahkan oleh pejabat setempat. Sistem itu saat ini sudah jarang diterapkan lagi seiring dengan semakin meningkatnya nilai tanah di wilayah ini.

Sistem bagi hasil menurut Bapak MUS juga diterapkan dalam proses pengolahan kebun atau tanah pertanian di Kuala Jambi. Sistem bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil panen antara pemilik lahan dengan pekerja di lahan tersebut. Pembagian hasil dapat berupa setengah bagian untuk pemilik lahan dan setengah bagian

lainnya untuk pekerja di lahan tersebut. Pola pembagian seperti ini masih sering digunakan, khususnya jika pekerja di lahan tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik lahan.

Berbeda halnya dengan sistem sewa lahan. Sistem sewa lahan terjadi jika pemilik lahan tidak bertempat tinggal di Kuala Jambi atau memiliki sumber pendapatan lain nonpertanian. Umumnya sistem sewa lahan dilakukan oleh etnis Jawa menyewa lahan milik etnis Bugis. Kemudian, pembayaran sewa lahan bisa dari hasil panen lahan tersebut atau dengan membayar tunai.

Sistem sewa lahan umumnya terjadi karena pendapatan dari usaha perkebunan menurun akibat harga komoditas kelapa dan pinang yang semakin murah. Bapak Mus lebih lanjut menuturkan bahwa sistem sewa lahan ini umumnya dilakukan oleh etnis Jawa kepada etnis Bugis. Etnis Jawa yang tidak memiliki lahan akan menyewa tanah milik etnis Bugis sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal yang berbeda terjadi dalam sektor kelautan yang melibatkan etnis Bugis sebagai pimpinan dan etnis lain yang menjadi pekerja dalam hubungan kerja. Etnis Bugis yang bertahan menjadi nelayan di Kampung Laut umumnya berasal dari etnis Bugis Bone. Mereka melaut dengan memanfaatkan aliran Sungai Batang Hari yang mengarah ke samudra. Fasilitas kapal yang mereka miliki berupa perahu dalam kategori ketinting atau disebut dengan *pompong* dalam bahasa setempat. Nelayan etnis Bugis yang memiliki ketinting hanya memiliki pekerja yang berasal dari keluarga sendiri, sedangkan mereka dengan kondisi kapal yang lebih besar seperti jenis *purse seine* tradisional atau modern, umumnya memiliki pekerja dari etnis Duano, Melayu, Jawa dan Bugis juga. Pekerjaan menangkap ikan yang dilakukan ini menerapkan sistem bagi hasil dalam penentuan upah untuk pekerjanya. Umumnya nelayan yang memiliki kapal jenis ini adalah mereka yang menjadi *toke* ikan, udang, atau lobster (udang nenek dalam bahasa setempat). *Toke* ini ada yang berasal dari etnis Bugis Bone atau Wajo, serta ada juga yang berasal dari etnis Tionghoa.

Pola hubungan kerja sama sosial dan ekonomi yang terjalin dalam masyarakat di Kampung Laut tidak terlihat secara nyata jika berdasarkan sentimen etnis. Padahal hal ini berlaku dalam pemilihan pekerja atau pihak yang akan diajak bekerja sama dalam suatu pekerjaan. Etnis yang melatarbelakangi diri seseorang menjadi pertimbangan khusus untuk diterima atau ditolak sebagai pekerja atau teman usaha. Hal ini didukung dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak DAN (72 tahun) dan Bapak MSR (75 tahun). Pekerja dari etnis tertentu memiliki label seperti malas dan tidak jujur, sehingga tidak akan diberi pekerjaan. Hal ini juga terkait dengan pengelompokan mengenai etnis tertentu yang layak bekerja di bidang pertanian serta bidang kelautan. Penilaian seperti ini berlangsung dalam kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah ini.

Pola hubungan sosial ekonomi ini membatasi pihak-pihak tertentu untuk terlibat secara mendalam hingga ke aspek yang luas baik dalam bidang pertanian maupun kelautan. *Toke* memiliki batasan untuk mempekerjakan etnis tertentu dalam usaha pertanian dan kelautan. Bapak SUL (73 tahun) mengungkapkan bahwa ketidakjujuran pekerja dan sikap malas dalam mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan, kerap kali membuat *toke* memiliki kekuasaan untuk tidak mempekerjakan individu tersebut kembali. Penilaian ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan seorang pekerja umumnya didasarkan pada etnis yang dimilikinya dan dari pengalaman yang telah didapatkan *toke* tersebut. Hal ini sering kali dialami oleh *toke* etnis Bugis. *Toke* memaknai pekerja dari etnis mereka sendiri dan jika memungkinkan, maka yang akan dipekerjakan berasal dari keluarga sendiri.

Pemilik lahan perkebunan yang ada di Kampung Laut dan Tanjung Solok sebagian besar adalah etnis Bugis, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Kepemilikan lahan oleh etnis Bugis berasal dari lahan warisan orang tua sebagai perantau awal, lahan sendiri yang dibeli dari hasil usaha selama ini, dan lahan warisan milik istri yang telah menjadi milik bersama dan dikelola untuk kepentingan keluarga. Etnis Jawa memiliki lahan yang dibeli dari etnis Melayu, ataupun dari etnis

Bugis yang memilih untuk menjual lahannya karena kebutuhan tertentu. Kepemilikan lahan etnis Tionghoa umumnya berasal dari lahan-lahan yang dijual oleh etnis Melayu dan etnis Jawa kepada mereka. Lahan yang ada umumnya ditanami kelapa dan pinang. Hanya sebagian besar lahan milik etnis Jawa dan etnis Melayu yang ditanami tanaman pangan, seperti palawija, atau tanaman buah seperti duku, nanas, atau pisang.

Etnis Bugis memperoleh lahan dengan cara membeli lahan dari *pesirah* pada masa awal kedatangan mereka ke wilayah Jambi. Lahan yang dibeli tersebut dilengkapi dengan surat jual beli yang kemudian menjadi sarana legalisasi pengelolaan lahan sehingga lahan tersebut tidak bisa diklaim oleh pihak-pihak lain. Eksistensi kepemilikan lahan etnis Bugis diakui jika memiliki surat supradik (surat tanah) yang berasal dari *pesirah* dan kemudian diakui oleh badan pertanahan setempat. Lahan yang dibeli pada awalnya masih berupa hutan atau semak belukar. Hutan tersebut akan ditebangi dengan menggunakan tenaga kerja dari keluarga sendiri dan dari etnis Jawa. Sistem pembukaan hutan atau semak belukar menjadi lahan perkebunan dikenal dengan istilah *pancung alas*. *Pancung alas* diartikan sebagai kegiatan menebangi pohon-pohon besar yang ada di tanah yang dibeli etnis Bugis untuk kemudian dibangun pondok berteduh dan ditanami dengan jenis tanaman pilihan mereka.

Lahan etnis Bugis pada awalnya ditanami dengan padi, tetapi setelah beberapa lama padi mengalami gagal panen akibat hama babi sehingga mereka beralih menanam kelapa dan pinang. Tanaman pokok yang mereka tanam adalah kelapa dan pinang yang akan mereka tanam di antara pohon-pohon kelapa. Sementara itu beberapa etnis Bugis lainnya akan memisahkan tanaman pinang dan tanaman kelapa dengan menanam di tanah yang berbeda atau bisa dengan menggunakan sistem *tumpang sari*. Masa panen kelapa dan pinang tidak lama. Kelapa dan pinang bisa dipanen dalam hitungan bulan. Kelapa dan pinang bisa dipanen sebulan sekali bahkan pinang terkadang juga bisa dipanen pada saat kondisi buahnya belum begitu tua atau masih muda. Hal ini karena harga jual pinang muda lebih mahal dibandingkan harga jual pinang tua. Sementara itu

harga jual kelapa sangat bervariasi, dari Rp2.300 turun menjadi Rp1.300, dan turun lagi menjadi Rp800.

Ketidakstabilan harga kelapa dan pinang menyebabkan adanya petani yang mencoba menanam kelapa sawit seperti yang dilakukan oleh pemilik lahan etnis Tionghoa. Namun, sebagian lagi tetap bertahan dengan menanam kelapa dan pinang dengan harapan suatu saat harganya bisa stabil kembali. Pengelolaan lahan milik etnis Tionghoa ini dilakukan oleh etnis Bugis dan etnis Jawa, sedangkan etnis Tionghoa selaku pemilik lahan umumnya tidak tinggal di wilayah Kampung Laut atau Tanjung Solok. Mereka tinggal di wilayah ibu kota kabupaten atau Kota Jambi.

Etnis Jawa memiliki lahan yang berasal dari lahan pembagian sebagai transmigran, upah mengelola lahan sejak awal kedatangan etnis Bugis, membeli lahan dari etnis Melayu, serta lahan warisan orang tua mereka. Lahan etnis Jawa umumnya ditanami tanaman palawija dan tanaman buah seperti duku atau nenas. Jumlah lahan yang kecil membuat mereka juga kerap kali menjadi pekerja di lahan milik etnis Bugis atau etnis Tionghoa. Bahkan ada juga yang bekerja sebagai anak buah di kapal milik nelayan Bugis. Upah yang mereka dapatkan sangat tergantung dengan kebijakan pimpinan tempat mereka bekerja. Ada yang berupa sistem bagi hasil setengah atau seperlima dan ada pula sistem upah dahulu berupa bagi lahan, yang didapatkan oleh etnis Jawa karena telah membantu etnis Bugis dalam mengelola lahan perkebunannya.

Lahan milik etnis Melayu merupakan lahan warisan dari keluarga mereka. Lahan yang mereka miliki ada yang mereka jual dan hasil penjualan dari lahan tersebut digunakan untuk membangun rumah di wilayah pasar. Rumah tersebut dibangun di atas lahan atau tanah milik mereka juga. Setelah beberapa saat, mereka biasanya akan menjual lahan lagi untuk membangun rumah lagi dan rumah lama akan dijual. Pembeli rumah lama tersebut biasanya dari etnis Bugis atau etnis Jawa. Sementara itu sisa lahan yang mereka miliki akan ditanami pinang, kelapa, pisang, tanaman buah, serta tanaman pangan. Tanaman buah biasanya seperti duku dan nenas, sedangkan tanaman pangan seperti palawija,

jengkol, dan petai. Pada umumnya mereka tidak akan menanam sayur-sayuran karena budaya makan yang berkembang dalam etnis Melayu sangat jarang untuk mengonsumsi sayur-sayuran. Pengelolaan lahan etnis Melayu juga dikerjakan keluarga sendiri dan jika mengharuskan untuk menggunakan tenaga kerja tambahan, maka yang akan dipekerjakan adalah mereka yang berasal dari etnis Jawa. Lahan etnis Melayu sangat jarang mempekerjakan pekerja dari etnis Bugis. Hubungan kerja dengan etnis Bugis biasanya terikat hubungan dagang jual beli hasil panen saja.

### **Kondisi Lingkungan Alam, Sosial, dan Budaya sebagai Daya Dukung Sistem Penghidupan Etnis Bugis**

Kondisi lingkungan di wilayah ini merupakan wilayah yang berada di pesisir Samudra Hindia atau berada pada muara Sungai Batang Hari. Pemukiman warga berada di atas rawa-rawa. Pada umumnya tempat tinggal terbuat dari papan dan bentuk rumah yang dimiliki adalah rumah panggung dengan bagian bawah merupakan rawa-rawa.

Pembangunan fisik berjalan sangat lambat. Hal ini terlihat dari beberapa jalan yang menghubungkan antarrumah warga yang masih berupa jalan papan dan belum berbentuk jalan permanen dari semen. Kondisi jalan yang masih berupa papan menyebabkan warga kesulitan dalam melakukan transaksi perekonomian karena mobil yang tidak dapat secara bebas memasuki jalan rumah antarwarga untuk membeli hasil panen atau hasil laut.

Bapak SYAM (48 tahun) salah satu informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa demi kelancaran menjual hasil kebunnya, maka ia terpaksa mengganti papan jalan di depan rumahnya sendiri dan tidak menunggu pemerintah melakukannya. Permintaan untuk mengganti papan yang lapuk telah lama diutarakan warga pada aparat kelurahan. Namun, karena dana belum turun dari pemerintah maka perbaikan jalan papan tersebut belum dilakukan. Pembangunan jalan yang terhambat menyebabkan masyarakat hanya dapat memanfaatkan Viar sebagai alat transportasi sehari-hari.

Viar merupakan merk motor niaga yang beroda tiga dan menjadi kendaraan angkut bagi warga di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok. Kendaraan ini dibolehkan untuk memasuki jalan dalam kelurahan karena tidak terlalu besar ukurannya, serta mampu mengangkut barang dalam kapasitas yang masih dimungkinkan sesuai dengan kapasitas jalan papan kelurahan. Persoalan keterlambatan pembangunan fisik di daerah ini juga terlihat dari kondisi jalan penghubung antara RT 2 dengan RT 3 di Kelurahan Tanjung Solok. Kondisi jalannya terputus karena ditabrak oleh kapal tongkang. Jalan yang putus hingga kini belum diperbaiki dengan baik oleh pemerintah setempat sehingga warga membangun jalan seadanya dengan menggunakan papan. Hal ini sangat membantu warga yang membutuhkan jalur transportasi tercepat untuk melakukan aktivitas sehari-hari mereka.

Bapak RID (55 tahun) menuturkan bahwa sistem pemerintahan yang ada di daerah ini mengikuti sistem pemerintahan yang berlaku sama di daerah lainnya yang ada di Indonesia. Proses pemilihan kepala desa dulunya berlangsung secara demokratis, hingga kemudian terjadi konflik antarwarga yang sama-sama ingin maju dan terpilih sebagai kepala desa. Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah mengubah tatanan sistem pemerintahan dan bentuk wilayah yang sebelumnya desa menjadi kelurahan. Perubahan ini menyebabkan satu wilayah desa di Kecamatan Kuala Jambi terbagi menjadi dua kelurahan, yaitu Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok. Perubahan ini juga membuat berbagai aspek yang ada di desa berubah sesuai dengan ketentuan nasional. Istilah *parit* sudah digantikan dengan RW dan penggunaan istilah *kepala parit* sudah tidak ada.

Proses pemerintahan juga berlangsung dengan lebih demokratis dan melibatkan semua warga yang ada tanpa terkecuali. Setiap warga di kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok mematuhi aturan yang berlaku termasuk mengenai batas wilayah kelurahan yang telah ditetapkan.

Jalinan hubungan sosial dalam latar belakang budaya yang berbeda tidak menyebabkan terjadinya perpecahan dalam kehidupan masyarakat di Kampung Laut. Perbedaan budaya yang mereka

miliki terlihat semakin memudar dan menyatu dalam budaya tempatan, yaitu budaya Melayu. Kehidupan sosial sehari-hari tidak memperlihatkan adanya perbedaan budaya yang menonjol antara etnis pendatang dengan etnis perantau. Bahasa sehari-hari dalam jalinan interaksi yang terjalin adalah bahasa Melayu Jambi dan umumnya etnis perantau sangat fasih dalam menggunakan bahasa ini beserta dialeknya. Penggunaan bahasa Bugis hanya digunakan dalam lingkungan keluarga dan ini juga tidak berlangsung setiap saat, sebab anak-anak dalam keluarga Bugis tidak semuanya mampu menggunakan bahasa Bugis.

Sistem pernikahan yang digunakan jika terjadi dalam keluarga Bugis yang masih memiliki anak perempuan, tetap menggunakan adat Bugis. Dalam artian, masih meminta *uang panai* dari pihak calon mempelai laki-laki. Akan tetapi dalam istilah lokal, *uang panai* ini dikenal dengan istilah *uang dapur*. Jumlah uang yang diminta juga disesuaikan dengan kemampuan pihak keluarga mempelai laki-laki untuk memenuhinya.

Keluarga etnis Bugis di perantauan pada zaman dahulu menerapkan sistem perjodohan dalam menentukan calon suami atau calon istri bagi anak-anak mereka, namun sekarang sudah tidak ada lagi sistem perjodohan. Walaupun demikian, anak-anak mereka tetap diharapkan untuk menikah dengan calon pasangan yang memiliki etnis yang sama dengan keluarga mereka. Penuturan Ibu SOA (45 tahun) mengungkapkan bahwa hal ini didasari oleh keinginan untuk mencari calon menantu yang mudah beradaptasi dengan keluarga dari latar belakang etnis yang sama. Terlebih lagi, diyakini akan memiliki rumah tangga yang langgeng jika menikah dengan pasangan dari etnis yang sama.

### **Peran Perempuan Etnis Bugis dalam Sistem Penghidupan di Perantauan**

Peran perempuan Bugis dalam bidang pertanian sangat sedikit, bahkan dapat diungkapkan bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dalam pengelolaan lahan pertanian. Hal ini karena terdapat perasaan gengsi dan tidak sesuai tradisi jika perempuan Bugis juga terlibat dalam pengelolaan pertanian. Keterlibatan perempuan dibatasi pada



proses pascapanen semata. Perempuan terlibat dalam *pengocekan* (membuka kulit) pinang dan penjualan hasil panen pinang. Lahan milik perempuan Bugis yang diwarisi dari orang tuanya juga menjadi hak milik bersama dengan suaminya setelah dia menikah. Sang suami juga memiliki kebebasan jika ingin menjual lahan warisannya tersebut. Pembagian lahan yang diwariskan dari orang tuanya didapatkan dari sistem adat Bugis dan jarang menggunakan sistem waris agama Islam dalam pembagian warisan pada keluarga etnis Bugis.

Bapak MAG (78 tahun) mengungkapkan bahwa pembagian lahan yang dimiliki oleh warga Bugis kepada anak-anaknya sebagai warisan orang tua umum dilakukan pada saat orang tua masih hidup. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik pada saat orang tua telah meninggal dunia. Anak-anak perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki, tetapi dalam keluarga tertentu akan memberikan lahan yang lebih luas bagi anak laki-laki. Hal ini dikarenakan anak laki-laki telah membantu usaha pengelolaan lahan. Orang tua memberikan lahan tersebut kepada anak laki-lakinya dengan cara menjual lahan tersebut kepada anaknya tetapi dengan harga yang murah. Jadi, pemberian lahan tersebut terjadi dalam proses jual beli dan tidak semata-mata diwariskan kepada anak laki-lakinya agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara anak laki-laki dan perempuan. Cara seperti ini menurut Bapak MAG dilakukan oleh orang tua etnis Bugis dengan jumlah aset lahan yang luas.

Keterlibatan perempuan Bugis dalam sektor perekonomian keluarga sangat terbatas. Perempuan tidak bekerja membantu suami atau orang tuanya di pertanian atau pun di bidang kelautan sepenuhnya. Namun, pengolahan pascapanen atau hasil tangkap sering kali melibatkan perempuan. Perempuan Bugis Wajo akan terlibat dalam kegiatan memanen pinang, mengupas kulit pinang, dan membantu mengawasi transaksi jual beli hasil panen. Sementara itu perempuan Bugis Bone yang lebih banyak terlibat di bidang perikanan, akan membantu perekonomian keluarga dengan terlibat dalam pengolahan hasil tangkap dalam bentuk membuat ikan asin, membuat *kletek* (kerupuk udang yang sudah masak), dan

membuat kerupuk udang mentah. Harga jual ikan asin Rp8.000 per kilo, harga jual ikan kering Rp6.000 per kilo, harga jual *kletek* Rp40.000 per kilo dan harga jual kerupuk udang Rp25.000 per kilo. Uang yang didapatkan sebagian menjadi modal untuk produksi berikutnya dan sebagian hasil pendapatan yang mereka peroleh dari mengolah hasil tangkap ini akan dimanfaatkan untuk keperluan keluarga. Keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi ini juga difasilitasi dengan keberadaan koperasi perempuan nelayan yang ada di Kelurahan Tanjung Solok, sedangkan koperasi tani yang ada sangat jarang melibatkan perempuan sebagai anggota aktifnya.

Akses perempuan tidak hanya dibatasi dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi keterlibatan dalam organisasi sosial seperti PKK atau majelis taklim juga sangat jarang. Hanya dalam koperasi perempuan nelayan saja mereka terlibat karena keanggotaan dalam koperasi mampu memberikan tambahan modal bagi mereka untuk mengembangkan usaha pengolahan ikan asin atau kerupuk udang. Dukungan diberikan untuk perempuan Bugis yang ingin terlibat dalam mendukung perekonomian keluarga. Keanggotaan koperasi perempuan nelayan ini juga sifatnya menyeluruh dan siapa pun bisa menjadi anggotanya dengan latar belakang etnis apa pun, tetapi dengan syarat memiliki usaha ekonomi yang dapat dikembangkan dengan bantuan modal.

## PENUTUP

Migrasi etnis Bugis ke wilayah Kuala Jambi merupakan proses perpindahan yang dilakukan sejak tahun 1950-an. Migrasi ini dipicu oleh nilai budaya Bugis dan keinginan untuk mencari kehidupan perekonomian yang lebih baik serta keinginan untuk memperoleh keamanan. Proses migrasi yang dilakukan etnis Bugis meliputi beberapa wilayah di Nusantara dan bahkan hingga ke Malaysia dan Singapura. Perantauan dilakukan dengan menggunakan perahu layar dan dalam proses pelayaran melakukan persinggahan di berbagai pelabuhan. Hingga kemudian etnis Bugis dapat ditemui di berbagai wilayah di Indonesia sampai saat ini. Wilayah perantauan etnis Bugis ini pada akhirnya mencapai wilayah Jambi. Kehidupan perekonomian yang lebih baik yang ingin

diraih, mendorong upaya pengembangan sistem penghidupan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan budaya di tempat perantauan. Keberhasilan yang diraih mendorong untuk meningkatkan aset yang dimiliki dan bahkan mendorong partisipasi dalam sistem pemerintahan dan politik yang ada di lokasi perantauan. Kondisi ekonomi di wilayah Kuala Jambi dikuasai etnis Bugis, baik dalam aspek perdagangan hasil perkebunan kelapa dan pinang maupun penjualan hasil laut berupa udang, lobster, ikan, serta olahan hasil laut lainnya. Keberhasilan yang diraih etnis Bugis di perantauan ini didukung perluasan modal sosial yang tidak hanya meliputi sesama etnis Bugis, tetapi juga terjalin erat dengan etnis lokal, yaitu etnis Melayu Jambi dan etnis Duano. Keberhasilan di perantauan juga mendorong untuk melibatkan sanak keluarga yang masih berada di daerah asal untuk bermigrasi ke wilayah Kuala Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acciaoli, G. L. (1989). *Searching or good fortune: The making of a bugis shore community at Lake Lindu, Central Sulawesi*. Australian National University: Thesis. DOI:10.25911/5d7633f0dcc2c. <http://hdl.handle.net/1885/111372>.
- Abdullah, A. (2017). Ethical politic and emergence of intellectual class. *Paramita: Historical Studies J*. 27(1): 34–49.
- Abdoellah, O. S. (2017). *Ekologi manusia dan pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ahimsa-Putra, H. S. (2003). *Ekonomi moral, rasional, dan politik dalam industri kecil di Jawa*. Yogyakarta: KEPEL Press.
- Ammarell, G. (2002). Bugis migration and modes of adaptation to local situations. *Ethnology*, 41(1), 51–6741.
- Arisandi, H. (2015). *Buku pintar pemikiran tokoh sosiologi dari klasik sampai modern*. Yogyakarta (ID): IRCiSoD.
- Black, R., Kniveton, D., & Schmidt-Verkerk, K. (2011). Migration and climate change: Towards an integrated assessment of sensitivity. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 43(2), 431–450. <https://doi.org/10.1068/a43154>.
- Budhi, S. (2015). Bugis Pagatan: Migration, adaptation and identity. *IOSR J of Humanities and Social Science*, 20(1), 71–78.
- Chambers, R. & Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st Century*. IDS Discussion Paper 296, IDS, Brighton.
- Dharmawan, A. H. (2007). Sistem penghidupan dan nafkah pedesaan: Pandangan sosiologi nafkah (*livelihood sociology*) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor. *Sodality: J Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi*, 1(2), 169–191.
- Ellis, F. (1999). Rural livelihood and diversity in developing countries. *Natural Resource Perspective*. Diakses dari: <https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/4486/40-rural-livelihood-diversity.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Field, J. (2003). *Social Capital*. London: Routledge.
- Field, J. (2010). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Fridayanti, N. & Dharmawan, AH. (2013). Analisis struktur dan strategi nafkah rumah tangga petani sekitar kawasan hutan konservasi di Desa Cipeuteuy Kabupaten Sukabumi. *Sodality: J Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi*. 1(1), 26–36.
- Harun, M. H., Sibe, M. Y., & Katutu, B. (2015). Prinsip “siri” dalam perkahwinan masyarakat Bugis di Jambi Indonesia. DOI: 10.13140/RG.2.1.4080.4560.
- Hein, J. & Faust, H. (2010). Frontier migration as response to environmental change: a case study from Central Sulawesi, Indonesia. STORMA Discussion Paper Series No. 31 10.13140/RG.2.2.13271.88484.
- Jumadi. (2016). Social capital of Madura barbers in Makassar, South Sulawesi. *Komunitas International J of Indonesian Society and Culture*, 8(2), 267–274 DOI:10.15294/komunitas.v8i2.6219.
- Kristiawan, N. (2017). Pola adaptasi ekologi budaya tiga komunitas di Jambi. *J Bhumi*. 3(2): 189–200.
- Lampe, M. (2012). Bugis-Makassar Seamanship and reproduction of maritime cultural values in Indonesia. *Humaniora*, 24(2), 121–132.
- Lee, E. S. (2007). A theory of migration. *Demography*, 3(1), 47–57.
- Lineton, J. (1975). Pasompe Ugi: Bugis migrant and wanderers. *Archipel*, 10, 173–201.
- Mansyur. (2016). Migrasi dan jaringan ekonomi suku Bugis di wilayah Tanah Bumbu Keresidenan Borneo bagian selatan dan timur 1930–1942. *J Sejarah Citra Lekha*, 1(1), 24–39.
- Moniaga, Vicky R. B. (2011). Analisis daya dukung lahan pertanian. *Agri-sosioekonomi J Ilmiah*

- Sosial Ekonomi Pertanian UNSRAT*, 7(2), 61–68.
- Mulyoutami, Elok, P., Ekawati, S. W., & Lala, M. K. (2016). *Agroforestry and forestry in Sulawesi series: Unravelling rural migration networks: land-tenure arrangements among Bugis migrant communities in Southeast Sulawesi*. Working Paper 225. Bogor (ID): World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program. DOI: <http://dx.doi.org/10.5716/WP16035.PDF>.
- Naim, M. (1979). *Merantau pola migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press.
- Poston, D. L., & Frisbie, P. W. (2005). *Ecological demography*. Poston D. L. dan Micklin M. (editors). Handbook of Population. New York (US): Kluwer Academic/Plenum Publisher. Pp 601–623.
- Rahman, K. M. A. (2015). Ethno-political conflict: The Rohingya vulnerability in Myanmar. *International J of Humanities & Social Science Studies*, 6959(288), 2349–6959.
- Rusli, S. (2014). *Pengantar ilmu kependudukan*. (edisi revisi). Jakarta (ID): LP3ES.
- Saleh, M. H. (2015). Dinamika masyarakat perbatasan: Eksistensi perantau Bugis di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. *J Borneo Administrator*, 11(1), 31–48.
- Sani, A. (2020). Diaspora Bugis dan perkembangan perdagangan kopra di Sumatera pada awal abad XX. *Tamadun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 20(1).
- Santo, R. S. (1978). *Concept of applied ecology*. New York (US): Springer-Verlag.
- Sasongko, Y. A. T. & Ekawati, S. W. (2013). Diaspora Madura: Analisis modal sosial usaha sektor informal oleh migran Madura di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. *Sodality: J Sosiologi Pedesaan*, 1(1), 52–63.
- Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. *Institute of Development Studies*. Working Paper 72. 1–22. <https://doi.org/10.1057/palgrave.development.1110037>.
- Scoones, I. (2009). Livelihoods perspectives and rural development. *The J of Peasant Studies*, 36(1), pp 171–196. DOI: 10.1080/03066150902820503.
- Sofyan, F. (2013). Pengaruh transmigrasi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 1(3), pp 1167–1180.
- Sjaf, S, & Zid, M. (2009). Sejarah perkembangan Desa Bugis–Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal Sejarah Lontar*, 6(2), Juli-Desember 2009.
- Tamtiari. (1999). Dampak sosial migrasi tenaga kerja ke Malaysia. *Jurnal Populasi*, 10(2), pp 39–56.
- Tachimoto, N. M. (1994). Coping with the currents of change: A frontier Bugis settlement in Johor, Malaysia. *Southeast Asian Studies*, 32(2), pp 1197–230.
- Tridakusumah, A. C, Supyandi, D., & Sukayat, Y. (2016). Social identity, ethnicity and internal mobility in Indonesia. Dalam Abdullah, A. G., Arifin, A., Adriany V., Aryanti, T., Nandiyanto, A. B. D., Nuria, H., & Nugraha, F. (Ed). *Prosiding 1st UPI International Conference on Sociology Education (UPI ICSE 2015)*. Bandung: Atlantis Press. 247–250.
- Vayda, A. P., & Ahmad, S., (1985). Forest clearing and pepper farming by Bugis migrants in East Kalimantan: antecedents and impact. *Indonesia*, 39, Pp 93–110.
- Yani, A. (2018). Dampak perang Makassar terhadap umat Islam Sulawesi Selatan abad XVII–VIII M. *Jurnal Rihlah*, 06(01), pp 113–131.
- Wartiharjono, S., (2017). Potensi konflik dan pembentukan modal sosial: Belajar dari sebuah desa transmigran di Kalimantan Timur. *J Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 30(2), 84–93.
- Wiharyanto, A. K. (2008). Kebijakan ekonomi kolonial tahun 1830–1901. *Journal Historia Vitae*, 22(1), pp 11–14.
- Widodo, B., Lupyanto, B., Sulistiono, D. A., Harjito, Hamidin, J., Hapsari, E, & Ellinda, C. (2015). Analysis of environmental carrying capacity for the development of sustainable settlement in Yogyakarta urban area. *Procedia Environmental Science*, 28, pp 519–527.